

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan besar dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 278,8 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Namun, tingginya jumlah penduduk belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga memunculkan tantangan seperti pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana tenaga kerja terserap di pasar kerja. Menurut BPS, TPT Indonesia pada bulan Agustus 2023 berada di angka 5,32 persen, menurun sebesar 0,38 persen jika dibandingkan dengan data pada bulan Februari sebelumnya.

Meskipun angka pengangguran di Indonesia menunjukkan tren penurunan, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), total angkatan kerja mencapai 146,62 juta jiwa, mengalami kenaikan sekitar 2,61 juta orang dibandingkan Februari 2022. Tingginya tingkat pengangguran ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun ekonomi. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin yang mendorong sebagian masyarakat untuk bertahan hidup dengan menjadi pengamen, gelandangan, atau pengemis. Selain itu, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja dapat memicu tekanan psikologis seperti stres dan keputusasaan, yang berujung pada peningkatan kasus kriminal, mulai dari pencurian, penipuan, perampokan, hingga peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Apabila penciptaan lapangan

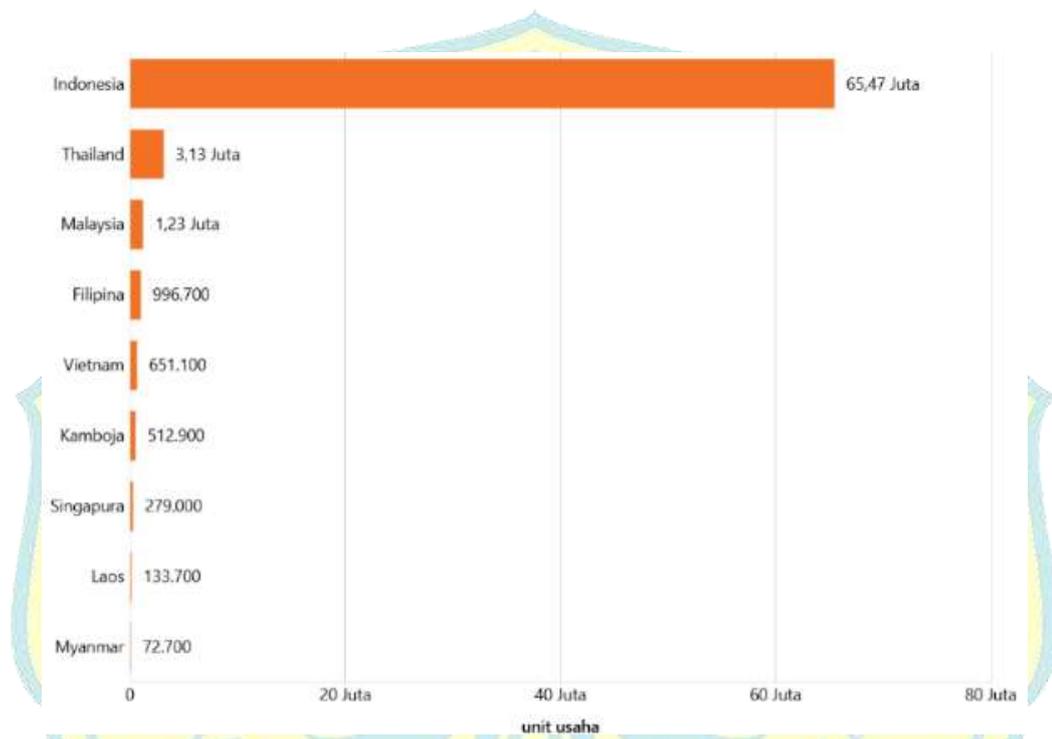
pekerjaan tidak sejalan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja, situasi ini dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi dan mengancam stabilitas sosial di masyarakat (Basrowi et al., 2018).

Dalam menghadapi permasalahan pengangguran dan potensi ketidakstabilan sosial yang ditimbulkannya, sektor kewirausahaan muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terbukti menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia, tidak hanya dalam menciptakan lapangan kerja tetapi juga dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. UMKM berperan penting dalam menyediakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Menurut Darojah et al., (2018) UMKM memiliki peran dalam peningkatan perekonomian Indonesia, yaitu peningkatan produktivitas yang mengakibatkan surplus perdagangan dan menurunkan jumlah barang impor.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai fondasi utama perekonomian nasional, tetapi juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian UMKM (2024), kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional mencapai 60%, jauh melampaui kontribusi dari usaha berskala besar yang hanya sekitar 40%. Selain perannya dalam aspek ekonomi, UMKM juga memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan (Janah & Tampubolon, 2024).

Pentingnya peran UKM telah mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk terus mendukung pengembangannya. Ada beberapa alasan utama yang mendasari upaya ini. Pertama, UKM terbukti memiliki kinerja yang lebih baik dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif. Kedua, dinamika UKM menunjukkan bahwa produktivitasnya sering meningkat melalui investasi dan adopsi teknologi baru. Ketiga, UKM kerap dianggap lebih unggul dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar, sehingga mampu beradaptasi dengan lebih cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen (Kadeni,

2020). Berdasarkan gambar dibawah ini, dapat terlihat bahwa UMKM di Indonesia menempati urutan pertama terbanyak dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Jumlah UMKM di Indonesia pada data yang didapat oleh ASEAN Investment Report mencapai sekitar 65,46 juta pelaku usaha. Sementara itu, negara-negara lain di ASEAN memiliki UMKM yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia.



Gambar 1. 1. Jumlah UMKM ASEAN

Sumber: Katadata (2022)

Kontribusi UMKM yang sangat besar, juga dibarengi dengan jumlah UMKM yang sangat banyak pula, menurut data (Kementerian UMKM, 2022) jumlah UMKM sekitar 65,4 juta yang setara dengan 99 persen usaha yang ada di Indonesia, dimana hanya 1 persen saja usaha skala besar. Usaha skala besar jumlahnya sedikit namun pengaruhnya sangat dominan dalam perekonomian nasional. Mengingat kontribusi UMKM yang besar dan jumlahnya yang sangat banyak dibandingkan dengan usaha skala besar, tentunya hal ini menjadi ketimpangan dan kesenjangan sosial sehingga pengangguran semakin tinggi (Wulandari & Uno, 2021). Maka, perlunya keseimbangan antara kuantitas dan kualitas pada UMKM. Sehingga, tidak

hanya banyak secara jumlah namun juga secara kualitas dari setiap UMKM semakin meningkat.

Peningkatan kualitas UMKM menjadi kunci pada keberhasilan usaha. UMKM yang mampu meningkatkan kualitasnya baik dari segi produk, sumber daya hingga akses pasar, akan mampu meraih keberhasilan dalam usaha (Fahmi. et al., 2022). Untuk mencapai kesuksesan, seorang wirausaha harus memahami secara mendalam seluk-beluk usahanya. Setiap bisnis tentu berupaya meraih keberhasilan, yang salah satu indikator utamanya adalah perolehan laba. Meskipun bukan satu-satunya tolak ukur, laba tetap menjadi faktor krusial karena merupakan tujuan utama dalam menjalankan sebuah usaha. Penelitian Nabila dan Suharsono (2023) juga menegaskan bahwa keberhasilan usaha juga ditandai dengan semakin berkembangnya usaha dari yang biasa saja hingga menjadi lebih baik dimasa mendatang yang sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan baik dalam aspek keuangan ataupun non keuangan.

Keberhasilan usaha UMKM dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengelola bisnis secara efektif dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan ini menjadi indikator utama untuk menilai apakah sebuah UMKM telah mencapai tingkat pencapaian yang diharapkan atau belum. UMKM yang berkembang dengan baik biasanya ditandai oleh berbagai peningkatan, seperti pertumbuhan penjualan, peningkatan pendapatan, dan faktor lainnya. Baik UMKM berskala kecil maupun besar terus berupaya meningkatkan kinerja mereka secara optimal, karena keberhasilan usaha tidak hanya mencerminkan perkembangan bisnis saat ini, tetapi juga menentukan prospek masa depan (Erawati. et al., 2024).

UMKM merupakan bagian dari sektor industri yang sering diidentikkan dengan karakteristik tradisional, modal kecil, keterampilan terbatas, serta efisiensi yang rendah. Bisnis kecil ini pada umumnya menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar. Beberapa kendala yang sering dihadapi adalah penguasaan teknologi yang kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, hingga kelemahan dalam manajemen usaha. Dalam jurnal Zhahirah. et al. (2023) dijabarkan beberapa tantangan yang saat ini

dihadapi oleh umkm diantaranya: Pertama, transformasi digital yang semakin maju dan canggih dapat menjadi tantangan bagi UMKM ketika tidak dapat diimbangi dengan baik, seperti halnya harus mengubah kebiasaan lama yang awalnya tradisional menjadi modern, pembayaran cash menjadi digital dan masih banyak lainnya. Kedua, masalah sumber daya manusia (SDM) dimana para pemilik usaha harus mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM mereka, tak hanya itu pemilik usaha pun juga harus terus meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha, seperti mengikuti pelatihan dan pendampingan usaha. Ketiga, Persaingan yang semakin tinggi dalam dunia usaha, terbukti dalam era distrupsi saat ini banyak bisnis yang akhirnya bangkrut karena kalah dalam bersaing.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Zulfikar dan Novianti (2018) menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM diantaranya:

- a. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam aspek manajemen dan pencatatan keuangan.
- b. Kesulitan dalam mendistribusikan atau memasarkan produk akibat fokus produsen yang lebih terarah pada proses produksi.
- c. Kendala dalam membangun kepercayaan (trust) dari konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan.
- d. Kurangnya proses pemantauan dan evaluasi yang memadai, baik dari pihak pemerintah maupun dari produsen itu sendiri.
- e. Keterbatasan dalam memperluas usaha karena terbatasnya akses terhadap sumber pendanaan.

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan suatu usaha, termasuk dalam sektor UMKM. SDM bukan hanya sebagai bagian dari pengelolaan bisnis, tetapi juga sebagai modal utama yang dimiliki oleh setiap usaha, terlepas dari bidangnya. SDM bertugas sebagai konseptor ide serta eksekutor yang menjalankan visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, UMKM yang tidak memiliki SDM yang kompeten akan mengalami kesulitan dalam mengelola usaha dengan baik. Kompetensi kewirausahaan yang dimiliki oleh SDM menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan. Kemampuan SDM untuk

merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi setiap aspek usaha akan berdampak langsung pada hasil yang diperoleh. Selain itu, kualitas SDM yang mumpuni juga sangat mempengaruhi daya saing bisnis di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk terus mengembangkan kemampuan dan keterampilan SDM mereka, agar bisa beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing usaha.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2022), kompetensi didefinisikan sebagai keahlian yang dimiliki oleh individu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang ada dalam pekerjaan mereka. Kompetensi ini melibatkan kemampuan SDM untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dengan langkah-langkah yang tepat dan akurat. Tanpa kompetensi yang baik, kualitas kinerja perusahaan bisa terpengaruh, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kompetensi dan kinerja perusahaan saling berkaitan erat. Untuk itu, baik pemerintah maupun perusahaan harus berperan aktif dalam mengembangkan kompetensi SDM, khususnya dalam meningkatkan kemampuan kewirausahaan para pelaku usaha. Pengembangan kompetensi ini penting agar operasional perusahaan berjalan lebih efisien, serta memastikan visi dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan optimal.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat penting, terutama di tengah berbagai ancaman dan tantangan yang dapat muncul jika pengembangan SDM gagal dilakukan dengan baik. Program pengembangan SDM bukan hanya sekadar upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga merupakan investasi yang efektif untuk kemajuan pembangunan ekonomi. Pengembangan SDM memiliki kaitan erat dengan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan kompetensi kewirausahaan menjadi salah satu kunci untuk mendorong terciptanya usaha-usaha baru atau UMKM yang memiliki peran vital dalam perekonomian sebuah negara. Kontribusi dari pengembangan SDM dalam sektor UMKM dapat dilihat melalui peningkatan angka produk domestik bruto (PDB) nasional, yang merupakan indikator penting dalam menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pengembangan SDM tidak hanya

memberikan manfaat langsung bagi para pelaku UMKM, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Kompetensi kewirausahaan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana seorang pelaku usaha dapat berhasil dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Pelaku usaha yang kompeten dapat menganalisis pasar dengan cermat, mengidentifikasi serta mengelola peluang yang ada, dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk mengatur berbagai aspek usaha. Mereka tidak hanya berfokus pada kondisi usaha saat ini, tetapi juga terus berinovasi dan mengembangkan berbagai aspek bisnis yang sudah ada, guna menghasilkan hasil yang lebih optimal dan menguntungkan di masa depan. Dengan kompetensi ini, pelaku usaha dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih kesuksesan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam usaha UMKM, terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, salah satunya adalah orientasi kewirausahaan. Orientasi ini mencerminkan sikap dan pandangan strategis pelaku usaha terhadap pengembangan bisnis mereka. Seorang pelaku usaha perlu memiliki visi yang jelas dan fokus pada tujuan usahanya, sehingga mampu secara proaktif mencari peluang baru untuk meningkatkan skala usaha, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah. Dengan mengadopsi pola pikir inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan, pelaku UMKM dapat menghadapi tantangan pasar dengan lebih percaya diri serta membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan kesuksesan usaha mereka di masa depan.

Nizam (2020) menjelaskan bahwa orientasi kewirausahaan merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan kinerja sebuah usaha. Orientasi ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah, gerak, dan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Lebih lanjut, Lumpkin & Dess menguraikan bahwa orientasi kewirausahaan mencakup proses, praktik, serta pengambilan keputusan yang diterapkan dalam pengelolaan usaha. Orientasi ini terlihat dari berbagai karakteristik, seperti semangat untuk terus

berinovasi, sikap proaktif dalam mencari dan memanfaatkan peluang baru, serta keberanian mengambil risiko yang terukur demi menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Minimnya inovasi dan kreativitas, ditambah dengan rendahnya kemampuan dalam mengidentifikasi peluang, menjadi salah satu kelemahan utama dalam pengembangan UMKM. Selain itu, lemahnya strategi pemasaran, keterbatasan jaringan distribusi, kurang optimalnya promosi, serta masalah pendanaan sering kali membuat UMKM sulit bersaing dalam mendistribusikan produknya di pasar.

Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya, provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak salah satunya adalah DKI Jakarta, yang menempati posisi ke empat dengan jumlah UMKM sebanyak 658.365 (Badan Pusat Statistik, 2023). Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi wilayah strategis yang menjadi tolak ukur bagi daerah lain dalam menilai kemajuan pembangunan, pemerintahan, serta dinamika sosial dan politik. Meskipun bukan lagi ibu kota negara, Jakarta tetap berperan sebagai pusat utama dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, industri, perdagangan, pendidikan, perbankan, dan jasa keuangan. Selain itu, Jakarta juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan serta gerbang utama bagi wisatawan internasional yang berkunjung ke Indonesia.

Menurut Zulfikar dan Novianti (2018), UMKM memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di negara berkembang maupun negara maju. UMKM menjadi pilihan favorit para pelaku usaha karena dapat dijalankan dengan modal yang relatif kecil namun tetap mampu bertahan, bahkan di tengah tantangan ekonomi. Salah satu bukti nyata adalah saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998. Ketika perekonomian nasional terpuruk, banyak UMKM yang tetap berjalan stabil dan menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam memenuhi beragam kebutuhan masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, terdapat sekitar 1,1 juta unit UMKM yang aktif beroperasi, yang mencakup sekitar 98,78 persen dari keseluruhan unit

usaha di daerah ini. Jumlah yang sangat besar tersebut mencerminkan betapa strategisnya peran UMKM sebagai penggerak utama roda perekonomian kota, tidak hanya dalam aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam menyediakan peluang kerja yang luas bagi masyarakat setempat.

Peran sentral UMKM ini menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terlebih lagi, di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika pasar yang terus berubah, UMKM menunjukkan daya tahan dan fleksibilitas yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai kondisi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM melalui pembinaan, akses pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah strategis yang perlu terus diupayakan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait, guna memastikan keberlanjutan dan kontribusi positif sektor ini terhadap kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.



Gambar 1. 2. Grafik Sensus Ekonomi Indonesia

Sumber: BPS Statistik (2016)

Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat bahwa sektor perdagangan tetap menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Berdasarkan data Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016, yang disampaikan oleh Kepala BPS Suhariyanto, jumlah pelaku usaha di sektor ini mencapai sekitar 12,33 juta atau sekitar 17,39% dari total keseluruhan usaha yang ada. Sektor perdagangan ini mencakup berbagai bentuk usaha, mulai dari perdagangan grosir hingga ritel, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung perputaran ekonomi di Jakarta. Keberadaan sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 1. 3. Jumlah Unit Usaha DKI Jakarta

Sumber: BPS Statistik (2016)

Berdasarkan hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, sektor usaha di wilayah ini didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah ke Atas (UMB), dengan total sebanyak 1.214.420 unit usaha. Data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah usaha mikro kecil secara signifikan dari tahun 2013 hingga 2016, dengan kenaikan sebanyak 1.134.626 unit usaha. Tren peningkatan ini mencerminkan minat yang tinggi terhadap sektor usaha mikro kecil di Jakarta. Hal ini tidak hanya menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang terjun ke

dunia usaha, tetapi juga menegaskan bahwa UMK memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.1. Persebaran UMKM DKI Jakarta

Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Wilayah dan Kelompok Pendapatan/Omset Provinsi DKI Jakarta Hasil SE2016 (Usaha)				
Kab/Kota	<= 300 Juta	300 Juta - 2.5 M	> 2.5 M	Jumlah
Kep Seribu Jakarta	3398	333	29	3760
Selatan	179040	49409	15089	243538
Jakarta Timur	203645	50213	8838	262696
Jakarta Pusat	99160	48553	12094	159807
Jakarta Barat	239847	67111	9651	316609
Jakarta Utara	180679	38913	8418	228010
DKI Jakarta	905769	254532	54119	1214420

Sumber: BPS Statistik (2016)

Berdasarkan data Sensus Ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, omzet yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di setiap kota di DKI Jakarta menunjukkan variasi yang signifikan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh jumlah UMKM yang beroperasi di masing-masing wilayah, serta faktor lain seperti jenis usaha, skala produksi, dan daya beli masyarakat setempat.

Meskipun bukan lagi pusat pemerintahan, Jakarta tetap menjadi jantung perekonomian Indonesia. Dengan status administratif yang mengalami perubahan menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kota ini terus memainkan peran strategis dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, perdagangan, industri, serta keuangan. Sebagai pusat bisnis utama, Jakarta masih menjadi tujuan utama investasi nasional

maupun internasional, didukung oleh infrastruktur modern, tenaga kerja berkualitas, serta jaringan transportasi yang terus berkembang.

Sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia, Jakarta tidak kehilangan daya saingnya. Justru, dengan berkurangnya beban sebagai ibu kota negara, Jakarta dapat lebih fokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup penduduknya. Pemerintah daerah mengarahkan transformasi kota ini menuju pusat keuangan dan bisnis berskala global, dengan mengadopsi inovasi teknologi dan kebijakan ramah lingkungan. Selain itu, Jakarta tetap menjadi episentrum kebudayaan dan pariwisata. Sebagai kota yang kaya akan sejarah dan keberagaman, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai pusat industri kreatif dan ekonomi digital. Berbagai event internasional, festival budaya, serta keberadaan pusat-pusat pendidikan unggulan menjadikan Jakarta sebagai kota yang dinamis dan terus berkembang.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan memberikan bantuan modal, termasuk hibah, bagi mereka yang ingin mengembangkan bisnisnya. Dengan adanya perhatian dan dukungan ini, UMKM mampu berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian yang memiliki potensi besar untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global.

Peran pemerintah dalam mendukung penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat strategis dan krusial. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif bagi perkembangan UMKM. Kebijakan dan dukungan pemerintah untuk UMKM tercermin dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta beberapa peraturan lainnya yang menekankan pada kemudahan perizinan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan akses pembiayaan, seperti Program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) yang memberikan akses pembiayaan lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM yang terdampak COVID-19. Selain itu, pemerintah juga mendukung UMKM dengan memfasilitasi promosi produk baik di pasar domestik maupun internasional. Ini termasuk penyediaan platform e-commerce, bazar, atau pameran dagang yang membantu meningkatkan visibilitas produk UMKM. Melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan, pemerintah turut meningkatkan kapasitas pemilik dan karyawan UMKM dalam mengelola usaha, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Kemudian penyediaan infrastruktur yang mendukung operasional UMKM, seperti pasar khusus UMKM dan inkubator bisnis, juga sangat penting dalam mendorong keberlanjutan usaha mereka.

Saat ini pemerintah sudah banyak memberikan upaya terhadap peningkatan kapasitas umkm serta pengembangan UMKM lewat program programnya, bahkan dalam hal modal pemerintah turut memberikan bantuan, seperti bantuan pendanaan usaha, kesempatan jejaring investor, dan dana hibah. Namun disamping banyaknya kesempatan dan bantuan yang diberikan, tidak menutup kemungkinan bahwa UMKM yang semakin banyak tidak dibarengi dengan kualitas dari UMKM itu sendiri. Ini yang menjadi permasalahan ketika UMKM semakin tumbuh tetapi kualitas tidak dibarengi, maka kesejahteraan yang diharapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kenyataannya. Pemberian modal yang diberikan oleh pemerintah akan terbuang percuma karena modal yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik.

Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan melahirkan wirausahawan baru, Pemerintah Provinsi DK Jakarta telah menginisiasi berbagai program pengembangan kewirausahaan, salah satunya adalah Program OK OCE (One Kecamatan, One Center). Program ini menjadi bagian dari Kegiatan Strategis Daerah dalam pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur DK Jakarta No. 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah. OK OCE diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam membina serta mengembangkan UMKM di Jakarta, sehingga

mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Program OK OCE Indonesia saat ini bukan hanya berfokus di daerah DK Jakarta saja, namun sudah tersebar luas di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dengan memiliki lebih dari 500 ribu anggota pada tahun 2017.

One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) adalah sebuah gerakan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan, dengan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Melalui inisiatif ini, OK OCE berupaya membangun kemandirian ekonomi dengan menyediakan berbagai fasilitas, seperti pelatihan (baik materi umum maupun khusus), pendampingan (mentoring individu dan kelompok), kemudahan dalam pengurusan perizinan, serta akses pemasaran melalui bazar dan media sosial.

Selain itu, program ini juga membantu wirausahawan dalam mendapatkan akses permodalan guna mendukung pengembangan usaha mereka. Program pembinaan kewirausahaan ini dilaksanakan melalui serangkaian pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan mental wirausaha bagi peserta binaan. Pelatihan tersebut mencakup pencarian serta pengujian ide bisnis sebelum menentukan usaha yang akan dijalankan.

Setelahnya, peserta akan mendapatkan pendampingan guna membantu memasarkan produk mereka, sementara OK OCE turut berperan dalam memfasilitasi perizinan dan legalitas usaha bagi anggotanya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di DK Jakarta sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, dalam pelatihan kewirausahaan para anggota harus mampu menanamkan motivasi yang kuat,

sehingga mereka terdorong untuk berwirausaha secara mandiri serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran.



Gambar 1. 4. Tujuh Tahapan OK OCE indonesia

Sumber: okoce.net

OK OCE Indonesia berperan dalam memfasilitasi para Penggerak dengan berlandaskan pada konsep 7 TOP (Tujuh Tahapan OK OCE Prima). Dalam struktur gerakan sosial ini, Penggerak OK OCE Indonesia berfungsi sebagai lapisan kedua yang mendukung penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Para Penggerak diberikan akses ke berbagai fasilitas dalam tahapan 7 TOP, yang mencakup proses pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, serta akses permodalan, yang kemudian dapat diteruskan kepada anggota di komunitas masing-masing.

OK OCE menjalankan gerakannya dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk masyarakat, komunitas wirausaha, pemerintah daerah, serta sektor swasta, lembaga, dan akademisi. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi berbagi yang mendorong terbukanya lapangan kerja, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM yang dibina oleh OK OCE diarahkan untuk berkembang dan naik kelas melalui peningkatan di berbagai aspek usaha. Hingga kini, OK OCE telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berhasil melahirkan puluhan ribu wirausahawan baru serta menciptakan sekitar 200 ribu lapangan kerja di wilayah tersebut (OK OCE, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul: "**Pengaruh Kompetensi Wirausaha Dan Orientasi Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha Dengan Inovasi Produk Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Umkm Binaan OK OCE Indonesia Di Wilayah DK Jakarta).**"

1.2.Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada latar belakang permasalahan serta berdasarkan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, peneliti menyusun rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi wirausaha memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha?
2. Apakah orientasi wirausaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha?
3. Apakah inovasi produk berpengaruh terhadap keberhasilan usaha?
4. Apakah kompetensi wirausaha berpengaruh terhadap inovasi produk?
5. Apakah orientasi wirausaha memiliki pengaruh terhadap inovasi produk?
6. Apakah kompetensi wirausaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha melalui inovasi produk sebagai variabel mediasi?
7. Apakah orientasi wirausaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha melalui inovasi produk sebagai variabel mediasi?

1.3.Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi wirausaha terhadap keberhasilan usaha.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh orientasi wirausaha terhadap keberhasilan usaha.

3. Menganalisis dan menguji pengaruh inovasi produk terhadap keberhasilan usaha.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi wirausaha terhadap inovasi produk.
5. Menganalisis dan menguji pengaruh orientasi wirausaha terhadap inovasi produk.
6. Menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi wirausaha terhadap keberhasilan usaha dengan inovasi produk sebagai variabel mediasi.
7. Menganalisis dan menguji pengaruh orientasi wirausaha terhadap keberhasilan usaha dengan inovasi produk sebagai variabel mediasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan teori dan literatur dalam bidang kewirausahaan, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi wirausaha, orientasi kewirausahaan, inovasi produk, serta keberhasilan usaha. Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Memperluas pemahaman mengenai determinan keberhasilan bisnis, dengan fokus pada bagaimana kompetensi dan orientasi wirausaha dapat meningkatkan performa usaha.
- b. Menyediakan bukti empiris terkait peran inovasi produk sebagai mediator dalam hubungan antara kompetensi serta orientasi kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha.
- c. Menjadi referensi awal bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi dinamika kewirausahaan serta strategi pengembangan UMKM dalam berbagai sektor industri maupun wilayah.
- d. Menambah khazanah literatur akademik di bidang kewirausahaan dan manajemen, khususnya dalam konteks pengembangan UMKM di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Stakeholder

Penelitian ini memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem kewirausahaan, seperti pemerintah, investor, dan organisasi pendukung UMKM, untuk memahami faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam merancang kebijakan, strategi pendanaan, serta program pendampingan yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

b. Bagi Pihak Eksternal Lainnya

Bagi lembaga inkubator bisnis, komunitas wirausaha, serta organisasi pendamping UMKM, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun program pelatihan dan mentoring yang lebih relevan. Dengan memahami peran kompetensi wirausaha, orientasi wirausaha, serta inovasi produk dalam keberhasilan usaha, lembaga-lembaga ini dapat lebih tepat sasaran dalam memberikan bantuan teknis, akses permodalan, serta bimbingan bagi pelaku UMKM agar dapat berkembang lebih cepat dan berdaya saing tinggi.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur dalam bidang kewirausahaan dan manajemen bisnis, khususnya terkait dengan hubungan antara kompetensi wirausaha, orientasi wirausaha, inovasi produk, dan keberhasilan usaha. Akademisi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam pengajaran, penelitian lanjutan, serta pengembangan model kewirausahaan yang lebih inovatif dan aplikatif.

d. Bagi Pelaku UMKM

Bagi pelaku usaha, penelitian ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana meningkatkan daya saing usaha melalui pengembangan kompetensi wirausaha dan orientasi bisnis yang lebih inovatif. Temuan penelitian ini dapat membantu UMKM dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan pasar, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran agar bisnis dapat berkembang secara optimal.